

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buta huruf, harapan hidup rendah dan kemiskinan merupakan persoalan yang masih sering dihadapi berbagai negara. Memiliki sumber daya manusia berkualitas dan hidup makmur menjadi tantangan dan tanggung jawab moral yang harus dijawab setiap negara. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia dan kemakmuran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat menggambarkan serta menjelaskan taraf kualitas sumber daya manusia tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan (Fajar dan Azhar, 2019). IPM dapat juga digunakan sebagai standar kesejahteraan sebuah negara masuk kategori maju, berkembang atau terbelakang.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan mempublikasikan laporan berkala setiap tahun yaitu *Human Development Report* (HDR), skala yang digunakan HDR yaitu 0 sampai dengan 1. Semakin nilai IPM mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin baik kualitas manusia di wilayah tersebut dan sebaliknya semakin nilai IPM mendekati 0 mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki rendah. Menurut Setiawan dan Hakim (2008), IPM meskipun tidak mengukur indikator komposit tunggal namun mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia sehingga dapat mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Indikator dasar yang digunakan IPM yaitu, umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy*

life), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*), dengan adanya peningkatan ketiga indikator maka diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Mirza, 2012).

Manusia yang sehat, makan dan berpendidikan lebih baik maka akan berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perbaikan teknologi. Pembangunan manusia harus dilakukan agar menciptakan manusia yang berkualitas dengan demikian akan dapat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Analisis IPM menyoroti bahwa masih ada kesenjangan antara negara maju dan berkembang sehingga diperlukan implementasi kebijakan pemerintah agar dapat mengurangi kesenjangan (Binneti, 2018). Menurut Azzaki (2021), tujuan negara melakukan pembangunan manusia yaitu agar dapat meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat. Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut maka, pemerintah membuat kebijakan dan program-program yang selaras sehingga dapat mendukung proses pembangunan manusia (Afzal *et al.*, 2009).

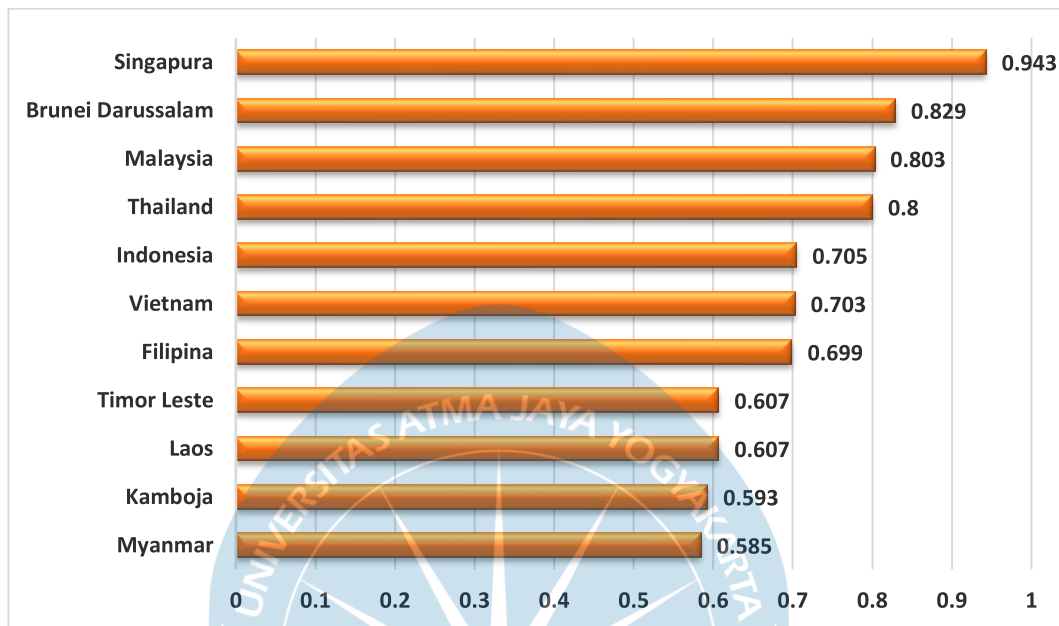
Negara-negara Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). ASEAN adalah pengelompokan regional yang mempromosikan kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok. Secara umum deklarasi Bangkok memuat tujuan utama yaitu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, pengembangan budaya di wilayah regional dan

kedua mempromosikan stabilitas kawasan dengan cara menghindari konflik lewat prinsip-prinsip yang telah dibangun bersama (Muhamad, 2011).

ASEAN berkembang pesat serta erat dengan mengadakan sekitar 700 pertemuan setiap tahun dalam bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan keamanan. Asosiasi ini awalnya hanya memiliki lima anggota yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura Thailand. Kemudian disusul oleh negara Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), Kamboja (1999). Timor Leste berkeinginan untuk menjadi anggota ASEAN sejak merdeka tahun 2002, pada tahun 2005 bergabung dengan forum regional ASEAN dan 2011 secara resmi mengajukan permohonannya menjadi anggota ASEAN namun masih dalam pembahasan dan beberapa negara seperti Singapura menolak karena dianggap belum cukup berkembang. Pada akhirnya Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada tahun 2022 setelah KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja.

ASEAN sebagai kelompok yang memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, terutama karena populasinya yang besar dengan memiliki total populasi 650 juta orang dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar \$2,8 triliun. ASEAN menggantikan Asosiasi Asia Tenggara (ASA) yang telah dibentuk oleh Filipina, Thailand, dan Federasi Malaya (sekarang bagian dari Malaysia) tahun 1961. Menurut Darmayadi (2015), komunitas ASEAN terbagi menjadi 3 pilar yaitu pilar komunitas politik-keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/ APSC*), pilar komunitas ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/ AEC*) dan pilar komunitas sosial budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). ASEAN terus menangani masalah kesenjangan sosial yang disebabkan kondisi miskin dan ketidakadilan

seperti akses pendidikan tinggi yang masih terbatas (Lim, 2019). Berikut adalah besarnya Indeks Pembangunan Manusia di negara-negara ASEAN tahun 2021.



Sumber: *United Nations Development Programme, 2022.*

Gambar 1.1
Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN Tahun 2021 (Skala 0-1)

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa negara anggota ASEAN indeks pembangunan manusia tertinggi diperoleh negara Singapura yaitu sebesar 0.943 dan terendah negara Myanmar 0.585. Negara Timor Leste yang baru masuk menjadi bagian anggota ASEAN mempunyai IPM sebesar 0.607. Perbedaan nilai IPM yang diperoleh menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan kesejahteraan antar anggota ASEAN. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan menghambat proses pembangunan manusia salah satunya adalah korupsi. Pengertian korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi dapat juga dibedakan menjadi dua pengertian yaitu secara sempit meliputi penyuapan

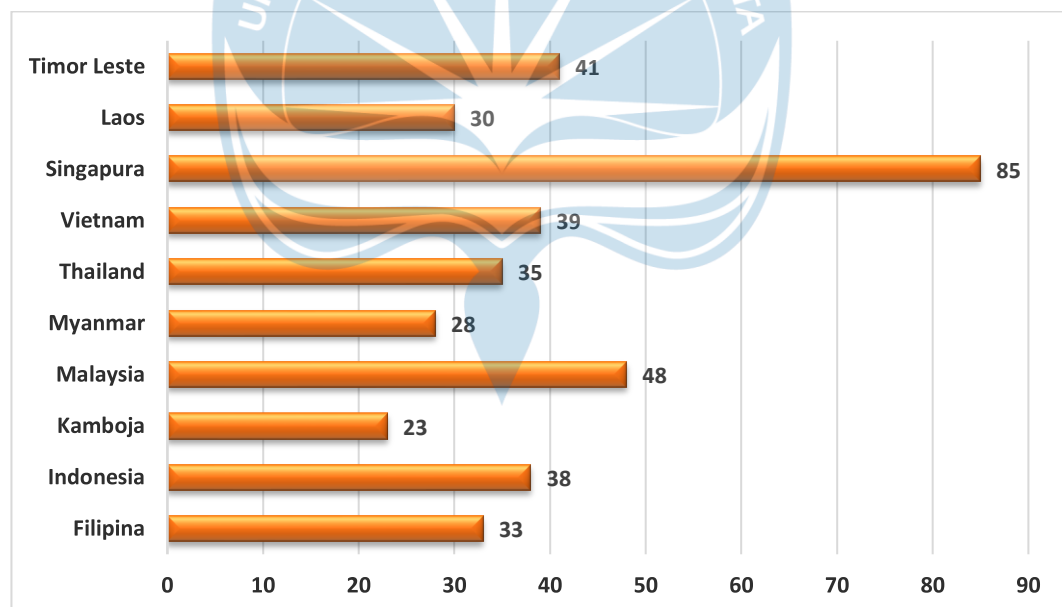
(*bribery*), penggunaan barang publik tidak sesuai dengan peruntukannya (*misappropriation of public resource*), komisi (*kickbacks commissions*), penyelewengan (*embezzlement*), dan pemberian melebihi nilai yang di perkenankan (*gift beyond a certain value*) dan pengertian secara luas berkaitan dengan nepotisme/pavoritisme, ketidakjujuran/kejahatan (*cheating, fraud dan dishonesty*) dan kejahatan intelektual (*intellectual crime*) (Pavarala, 1996).

Menurut Hanafi (2018) dalam studinya konsekuensi negatif dari korupsi salah satunya adalah menghambat pembangunan manusia, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Korupsi membuat rencana pemerintah bagi pembangunan akan terhambat dikarenakan dana yang telah dianggarkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Blackburn *et al.*, (2005) juga berpendapat yang sama bahwa dengan korupsi maka akan menghambat rencana untuk pembangunan karena mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Mayoritas anggota ASEAN adalah negara berkembang dengan sistem kelembagaan yang belum baik, sehingga tingkat korupsi relatif tinggi sedangkan untuk negara maju memiliki ciri utamanya tingkat korupsi cenderung rendah. Menurut Waluyo (2010), negara yang relatif kaya biasanya memiliki tingkat korupsi rendah dibandingkan negara miskin.

Gambaran tingkat korupsi di suatu negara dapat dilihat melalui laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) yang dipublikasikan oleh *Transparency International* (TI), sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang anti-korupsi. CPI yaitu

gabungan indeks persepsi tentang korupsi di suatu negara, di mana persepsi yang digunakan berasal dari pelaku bisnis dan para ahli tentang tingkat korupsi di sektor pemerintahan. Pada tahun 2012 *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan jabatan publik bagi keuntungan pribadi” (*the abuse of public office for private gain*).

Transparency International didirikan oleh Peter Eigen pada tahun 1993 dan diakui paling berpengaruh dalam pembentukan perhatian pada masalah korupsi. TI mengingatkan pokok dari IPK memotret persepsi tentang tingkat korupsi di suatu negara. Berikut adalah gambaran Indeks Persepsi Korupsi negara-negara ASEAN tahun 2021.



Sumber: *Transparency International*, 2022.

Gambar 1.2
Indeks Persepsi Korupsi di ASEAN Tahun 2021 (Skala 0-100)

Berdasarkan Gambar 1.2 indeks persepsi korupsi di ASEAN dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), dapat dilihat negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi diperoleh Singapura yaitu 85 menunjukkan bahwa

Singapura dianggap sangat tidak korup dan bersih dari korupsi. Lembaga pemberantas korupsi yang ada di Singapura adalah *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) melakukan penyelidikan dan menuntun kasus korupsi di sektor publik dan swasta. Negara dengan indeks persepsi korupsi terendah adalah Kamboja dan Myanmar yaitu 23 dan 28 ini artinya kedua negara masuk kategori negara sangat korup. Negara Kamboja memiliki sistem peradilan dan lembaga penegak hukum yang paling lemah dan korup. Kemudian negara Myanmar pemimpin sipil melakukan korupsi sehingga menyebabkan kudeta yang juga menyebabkan kekerasan.

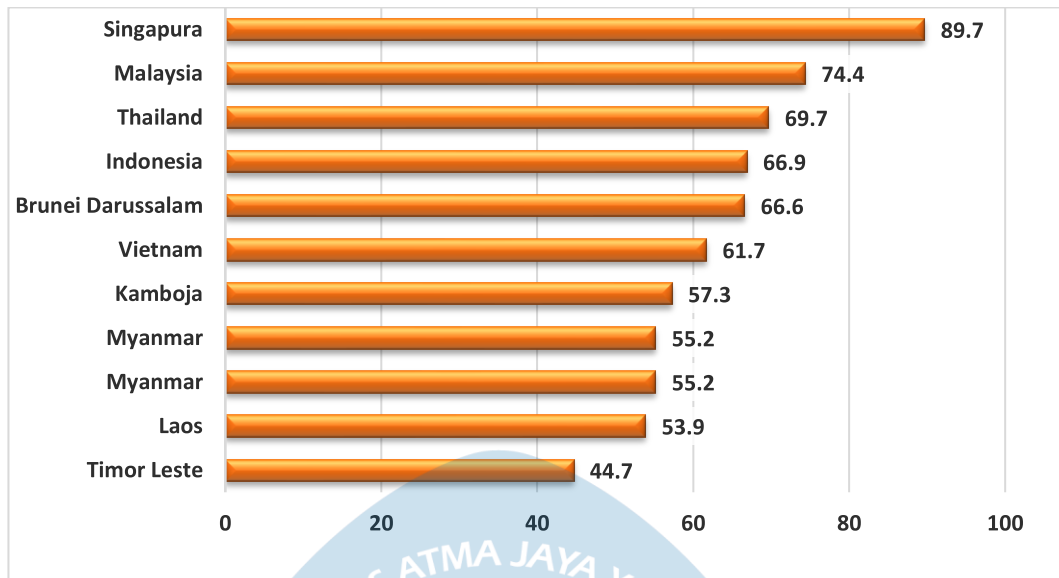
Pembangunan manusia juga dapat dipengaruhi oleh kebebasan ekonomi. Suparyati (2014), berpendapat bahwa dengan kebebasan ekonomi akan memberikan ruang bagi negara untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam bekerja, memproduksi, berdagang dan berinvestasi sesuai yang diinginkan sehingga peningkatan kebebasan ekonomi akan meningkatkan standar hidup dalam pembangunan manusia. Menurut Gwartney dan Lawson (2002), kebebasan ekonomi berarti tingkat keberadaan ekonomi pasar komponen utamanya adalah pertukaran sukarela, persaingan bebas dan perlindungan orang serta properti.

Kebebasan ekonomi membentuk kerangka aturan hukum yang stabil sehingga kontrak yang dibuat akan dijunjung tinggi serta melindungi kepemilikan pribadi dan intervensi yang terbatas dalam bentuk kepemilikan pemerintah, peraturan dan pajak. Kebebasan ekonomi juga dapat dikatakan sebuah hadiah yang diberikan negara dengan tujuan agar tercapainya kemakmuran. Studi yang dilakukan oleh Feldmann (2021), ditemukan bahwa kebebasan ekonomi secara

positif mempengaruhi pendidikan, kesehatan dan pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan Georgiou (2012) juga membuktikan bahwa kebebasan ekonomi tidak hanya menumbuhkan kewirausahaan tetapi juga pendidikan, kesehatan dan pendapatan sehingga meningkatkan kesejahteraan yang dihitung dengan IPM.

Kebebasan ekonomi dapat diukur dengan melihat Indeks Kebebasan Ekonomi (IKE) atau *Economic Freedom Index* (EFI) yang dilaporkan setiap tahunnya oleh *Heritage Foundation* sebuah lembaga yayasan pemikir Amerika Serikat. Pengukuran indeks kebebasan ekonomi dimulai tahun 1995 dan skala pengukuran indeks 0 sampai dengan 100, semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi tingkat kebebasan ekonomi negara tersebut. Komponen penyusun kebebasan ekonomi ada 10 yakni *property right, freedom from corruption, fiscal freedom, government spending, business freedom* atau *regulatory freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom* dan *financial freedom*.

Indeks Kebebasan Ekonomi (IKE) mengukur kebebasan sebagai prasyarat untuk pembangunan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfokus pada pembangunan manusia sebagai tujuan akhir (Kinnunen *et al.*, 2019). Hubungan kebebasan ekonomi dan pembangua manusia dapat terlihat jelas, ketika semakin banyak kebebasan ekonomi maka kinerja ekonomi juga semakin tinggi. Gambar 1.3 berikut menunjukkan besaran Indeks Kebebasan Ekonomi di negara-negara ASEAN tahun 2021.



Sumber: *Heritage Foundation*, 2022.

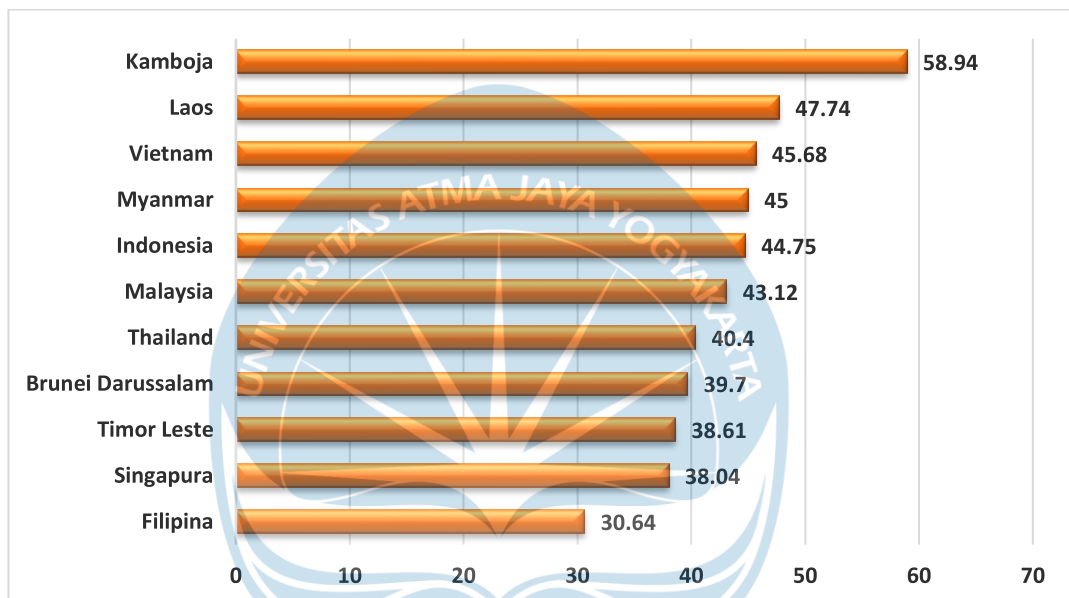
Gambar 1.3 Indeks Kebebasan Ekonomi di ASEAN Tahun 2021 (Skala 0-100)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat negara Singapura memiliki indeks kebebasan ekonomi tertinggi di ASEAN dengan skor 89,7 ini menunjukkan bahwa Singapura menjadi negara dengan kebebasan ekonomi yang tertinggi. Negara Singapura sangat mendukung perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan perdagangan, menghapus birokrasi yang berlebihan serta sistem pajak yang murah dan rendah sehingga memudahkan pelaku usaha untuk berbisnis, hal ini yang menyebabkan indeks kebebasan ekonomi di Singapura tinggi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Skor Kebebasan ekonomi terendah adalah Timor Leste yaitu 44,7 negara ini mendapatkan skor terendah tidak tanpa alasan, ada banyak korupsi besar-besaran yang terjadi di Timor Leste yang mengakibatkan melemahnya integritas pemerintah serta membuat sistem yudisial yang tidak efektif sehingga menghambat proses kebebasan ekonomi.

Selain dipengaruhi oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kebebasan Ekonomi (IKE), IPM juga dapat dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menggambarkan distribusi dari jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun keatas), semakin besar jumlah penduduk usia kerja menyebabkan semakin besar angkatan kerja sehingga TPAK juga menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2007). Definisi lain TPAK yaitu sebagai presentasi penduduk usia kerja non-institusional (mereka yang berusia 16 tahun keatas) melaporkan diri mereka bekerja atau tidak bekerja (Aaronson *et al.*, 2006). Apabila jumlah penduduk lebih banyak sekolah dan mengurus rumah tangga, maka akan semakin sedikit yang masuk golongan bukan angkatan kerja sehingga angkatan kerja menjadi sedikit akibatnya TPAK semakin kecil (Mantra, 2003). Indikator yang ada di TPAK dapat digunakan untuk melihat tingkat kesulitan tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan (Bedagai *et al.*, 2023). Peluang kerja yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat dan standar hidup layak sehingga akan mewujudkan kemakmuran. Indikator utama IPM adalah kesehatan, pendidikan dan hidup layak dengan adanya partisipasi angkatan kerja maka dapat mempengaruhi ketiga indikator IPM.

Partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa banyak jumlah tenaga kerja yang terserap pekerjaan sehingga memberikan pengaruh pada pendapatan masyarakat. Secara langsung masyarakat dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas ketika pendapatannya meningkat sehingga memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia. Sebaliknya dengan penurunan pendapatan maka rumah tangga akan mengurangi belanja pendidikan

dan kesehatan yang layak, dan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mempengaruhi ketiga indikator utama pembangunan manusia, sehingga dapat menjadi peran penting untuk menentukan tingkat IPM. Berikut adalah gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja negara-negara ASEAN tahun 2021.



Sumber: *World Bank*, 2022.

Gambar 1.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15-24 di ASEAN Tahun 2021 (%)

Dari Gambar 1.4 dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2021 tertinggi diperoleh negara Kamboja yaitu 58,94%. Laos dan Vietnam di posisi kedua dan ketiga yaitu 47,74 % serta 45,68 %. Kemudian di posisi terendah ditempati oleh negara Filipina dengan TPAK sebesar 30,64%. Salah satu penyebab Filipina berada di posisi terakhir karena terkena badai dan bencana alam yang dapat mempengaruhi partisipasi angkatan kerja, khususnya sektor pertanian dan perikanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa masih ada kesenjangan kesejahteraan antar negara anggota ASEAN yang ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia yang berbeda-beda, padahal indeks pembangunan manusia merupakan dasar awal yang mencerminkan bagaimana suatu negara menanggapi tantangan ekonomi sosial yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan menghambat pembangunan manusia antar negara ASEAN berdasarkan uraian di atas berasal dari faktor sosial dan ekonomi, yaitu korupsi, kebebasan ekonomi dan partisipasi angkatan kerja oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kebebasan Ekonomi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Kebebasan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2012-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Kebebasan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan publik dan kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia.
2. Peneliti/ pembaca, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh indeks persepsi korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia di ASEAN.
3. Bagi kepustakaan, sebagai acuan referensi atau literatur tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian yang serupa

1.5. Hipotesis

1. Diduga Indeks Persepsi Korupsi memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN 2012-2021
2. Diduga Indeks Kebebasan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021
3. Diduga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012-2021

1.6. Sistematika Penulisan

Rencana sistem penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka membahas landasan teori dan studi terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai acuan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari data penelitian, sumber data tersebut, Teknik pengumpulan data, model, alat analisis, definisi operasional.

BAB IV Hasil Pembahasan

Hasil pembahasan berisi tentang gambaran hasil penelitian yang meliputi hasil regresi data variabel penelitian serta analisis hubungan antar variabel dependen dan independent

BAB V Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintah maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.